

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO SAGU OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

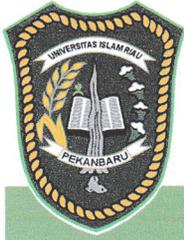
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu  
Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**MAZLI YAKUB  
157310576**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2019**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1139/A\_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Mazli Yakub  
NPM : 157310576  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu Oleh Dinas  
Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil  
Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti  
Persentase Plagiasi : 21%  
Jumlah Halaman : 75 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 November 2019

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**  
NPK. 160702589

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO SAGU OLEH DINAS  
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK**

Oleh : MAZLI YAKUB

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang efektif Hal itu bisa dilihat dari penyuluhan, pembinaan, yang dilakukan hanya 3 kali pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan adalah Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala bidang UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Pelaku Usaha Mikro Sagu. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu ini memang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. meski terdapat beberapa hambatan dalam memberdayakan pelaku usaha mikro sagu. Sedangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan pada tahap penyuluhan. Hambatan – hambatan yang terdapat pada proses pemberdayaan ini yaitu Dana APBD yang tidak memadai sehingga dinas tidak mampu melakukan pelatihan dan penyuluhan semaksimal mungkin, Saran peneliti kepada Dinas Perindustrian Perdagangan supaya lebih banyak melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro sagu agar mereka bisa memiliki pengetahuan yang luas tentang memproduksi produk sagu yang berkualitas. Saran peneliti kepada pelaku usaha mikro sagu sebaiknya pelaku usaha mikro sagu ini harus berinisiatif untuk memperluas wawasan mereka dengan cara mencari informasi di internet tidak tergantung kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Kata Kunci : Pemberdayaan, Penyuluhan, Pelatihan**

**THE EMPOWERMENT OF SAGO MICRO ENTREPRENEURS BY THE  
INDUSTRIAL DEPARTMENT, COMMERCE, COOPERATIVE AND  
SMALL AND MEDIUM BUSINESSES OF MERANTI REGENCY  
ABSTRACT**

By: MAZLI YAKUB

The problem in this research is about Empowerment of Sago Micro Businesses by the Meranti Islands Regency Trade Industry Office that is still ineffective. This can be seen from counseling, coaching, which was carried out only 3 times in 2018. The purpose of this research is to find out, analyze, and describe the Empowerment of Sago Micro Businesses in Meranti Regency, and to identify inhibiting factors in the Empowerment of Sago Micro Businesses in Meranti Regency. The type of this research was conducted descriptive qualitative. The focus of this research determined the Empowerment of Sago Micro entrepreneurs by the Industrial Department, Commerce, Cooperatives and Small and Medium Business in Meranti Regency. The research informants were the Head of the Meranti Islands Regency Trade Industry Office, the Head of the Meranti Regency UKM, and the Sago Micro entrepreneurs. While the data collection technique was carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this research showed that the empowerment of micro sago entrepreneurs was indeed running smoothly although there were several obstacles in empowering micro sago business entrepreneurs. Whereas in the implementation of empowerment at the counseling stage, Sago Micro entrepreneurs could not yet understand what had been done by this department because counseling was done that was not yet maximum where the numbers could be calculated so that the weak knowledge gained by the micro sago entrepreneurs in Meranti Regency in utilizing the results of the empowerment of business people, sago micro in Meranti Regency. The Obstacles in this empowerment process are inadequate APBD funds so that the department is not able to conduct training and counseling as much as possible, besides that the knowledge of micro sago entrepreneurs is still lacking and does not take the initiative to make their business more advanced.

**Keywords: Empowerment, Counseling, Training**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil alamin dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan – nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil MenengahKabupaten Kepulauan Meranti** tanpa halangan satupun dan menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satupada fakultas ilmu social dan ilmu politik

Shalawat serta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatulhaq di jagatrayaini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa kita umat manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulisan tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Terimakasih tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. H Syafrinaldi, S H, MCL,
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau.

3. Bapak Budi Muliato, S.IP, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau.
4. Ibu Dr.Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Siselaku .dosen pebimbing I (satu) atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku dosen pebimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Semua Bapak dan Ibuk Dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah – mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada ayah dan ibunda tercinta, beserta seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
8. Terimakasih kepada abang kita yaitu Almi S.IP yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan IP. D angkatan 2015 dan kerabat – kerabat sahabat yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu

berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan, aminyarobbal'amin.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan rahmat dari Allah SWT. Demikianlah, semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kitasemua, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Oktober2019  
Penulis

Mazli Yakub

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangandibawahini :

Nama : Mazli Yakub  
Npm : 157310576  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Up : Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Sagu Dalam Peningkatan Mutu Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan

Atas nama saya yang  
didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang  
melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa nama saya Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ter nyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, Oktober 2019  
Pernyataan

Mazli Yakub

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Teori Pemerintahan.....	17
2. Teori Pemberdayaan.....	22
3. Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	24
4. Konsep Mutu .....	25
5. Konsep industri kecil menengah.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Pikir .....	29
D. Konsep Operasional .....	31
E. Operasional Variabel.....	32
<b>BAB III BAHAN/OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan dan Key Informan.....	36
D. Teknik Penentuan Informan dan Keyinforman.....	37

E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Jadwal Penelitian.....	40

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis .....	41
B. Gambaran Umum Demografis .....	44
C. Sejarah Disperindag .....	45
D. Visi dan Misi Disperindag .....	46
a. Visi .....	46
b. Misi .....	48
E. Rincian Tugas dan Fungsi Disperindag, Koperasi dan UKM.....	48
a. Tugas dan Fungsi Kepala Disperindag .....	48
b. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Koperasi dan UKM.....	49
c. Tugas dan Fungsi Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM.....	49
F. Struktur Organisasi Bidang Koperasi dan UKM .....	51

#### **BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	52
B. Hasil Penelitian dan Observasi.....	55
1. Pemungkinan .....	55
2. Penguatan .....	58
3. Perlindungan .....	61
4. Penyokongan .....	63
5. Pemeliharaan .....	66
6. Hambatan-hambatan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KabupatenKepulauan Meranti.....	68

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..... 69  
B. Saran ..... 70

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 72**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	8
Tabel.. 1.2 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Sagu yang telah di Berdayakan.....	11
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel II. 2 Operasional Variabel.....	32
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel III.2 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel VI.1 Luas Wilayah .....	43
Tabel V.1 Informan Menurut Jenis Kelamin .....	53
Tabel V.2 Informan Berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel V.3 Informan Berdasarkan Usia.....	54

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pada daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan pada tanggal 4 Mei 1999. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi akibat pasca reformasi perubahan UUD 1945 mulai dari perubahan pertama sampai perubahan keempat.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap

undang-undang yang berakhir pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang juga mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dengan perkembangan politik dalam masa kini maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 5 ayat (4) penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pasal 1 butir 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (9) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Menurut Sunarno Siswanto (2009:7-8) pelimpahan wewenang pemerintahan yang

sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertical didaerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (11) asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak

positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 9 ayat (4) penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap urusan yang bersifat konkuren ini senantiasa ada bagian urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada pula bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan yang konkuren secara proposional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalistis, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib
2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah**
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Disamping urusan wajib, daerah juga mempunyai urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Menurut Hanif Nurcholis (2005) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian**
- h. Transmigrasi

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan – urusan wajib dan pilihan dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni urusan pada bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 41 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memberdayakan usaha mikro berbasis sagu terdiri atas beberapa program pemberdayaan;

1. Mengkoordinasikan
2. Membina
3. Merumuskan

Pemberdayaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan adalah tugas yang diemban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan potensinya. Dengan basis kemandirian local serta adanya pemberdayaan dari pemerintah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejolak-gejolak social tersebut. Dalam konteks ini penting sekali untuk menekankan bahwa pengembangan kewirausahaan yang berbasis usaha kecil menengah perlu dikembangkan, karena dengan hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi-inovasi mereka untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Menurut Badan pusat statistik adapun kriteria skala UMKM yaitu sebagai berikut: Usaha mikro terdiri dari 1-4 tenaga kerja. Kriteria usaha mikro mempunyai kekayaan bersih paling banyak 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000.

Salah satu usaha Mikro yaitu terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten kepulauan Meranti adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam yakni salah satunya pohon sagu. Bahkan kabupaten kepulauan meranti merupakan salah satu penghasil sagu terbesar di Indonesia. Tanaman sagu sejak dulu sudah

menjadi primadoma masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat Riau lebih mengenal Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah sagu, bahkan ibu kota kabupatennya, Selatpanjang digelar dengan kota sagu. Tanaman sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti ini memiliki potensi yang luar biasa.

Tanaman sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti diolah menjadi berbagai jenis makanan oleh pelaku usaha mikro. Adapun pelaku usaha mikro yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Jumlah pelaku usaha mikro sagu di kabupaten kepulauan meranti**

NO	PRODUK UTAMA	NAMA PENGUSAHA/KELOMPOK	ALAMAT
1	Mie sagu	Supardi	Tebing Tinggi
2	Mie sagu	Saryatun	Tebing Tinggi
3	Mie sagu	Arianto	Tebing Tinggi
4	Mie sagu	Kamarudin	Tebing Tinggi
5	Mie sagu	A. Muis	Tebing Tinggi
6	Mie sagu	Ida	Tebing Tinggi
7	Mie sagu	Asiah	Tebing Tinggi
8	Mie sagu	Norhayati	Tebing Tinggi
9	Mie sagu	Darbi	Tebing Tinggi
10	Mie sagu	Giarti	Tebing Tinggi
11	Mie sagu	Jumiem	Tebing Tinggi
12	Mie sagu	Bujiati	Tebing Tinggi
13	Mie sagu	Mulyati	Tebing Tinggi
14	Mie sagu	Junaidi	Tebing Tinggi
15	Mie sagu	Azwan	Tebing Tinggi
16	Mie sagu	Anuar	Tebing Tinggi
17	Mie sagu	Zaleha	Tebing Tinggi
18	Mie sagu	Bude	Tebing Tinggi
19	Mie sagu	Usaha Kamboja	Tebing Tinggi
20	Mie sagu	Mandiri Anggrek	Tebing Tinggi
21	Mie sagu	Wahyu Mandiri	Tebing Tinggi
22	Mie sagu	Parida	Tebing Tinggi
23	Mie sagu	MA. Basri	Tebing Tinggi
24	Mie sagu	Syafri	Tebing Tinggi
25	Mie sagu	Usaha Bersama	Tebing Tinggi
26	Mie sagu	Dahnar	Tebing Tinggi Timur

27	Mie sagu	Linda Wati	Merbau
28	Mie sagu	Maryana	Merbau
29	Mie sagu	Mahani	Merbau
30	Mie sagu	Sabariah	Merbau
31	Mie sagu	Rosida	Merbau
32	Mie sagu	Zammi	Merbau
33	Mie sagu	Kamariah	Merbau
34	Mie sagu	Mayam	Merbau
35	Mie sagu	Juma'ah	Merbau
36	Mie sagu	Junaidi	Merbau
37	Mie sagu	Aisah	Merbau
38	Mie sagu	Yunaida	Merbau
39	Mie sagu	Siri Yusmi	Merbau
40	Mie sagu	Raimah	Merbau
41	Mie sagu	Wanita Tani Sejahtera	Merbau
42	Mie sagu	Usaha Desa Permai	Merbau
43	Mie sagu	Katumi	Merbau
44	Mie sagu	Linda Wati	Merbau
45	Mie sagu	Ita	Merbau
46	Mie sagu	Arbainah	Merbau
47	Sagu rendang	Nuraini	Rangsang
48	Sagu rendang	Azam Jamil	Tebing Tinggi
49	Sagu rendang	Yulinar	Tebing Tinggi
50	Sagu rendang	Junaida	Tebing Tinggi
51	Sagu rendang	Asnani M Nur	Tebing Tinggi
52	Sagu rendang	Nuryusni	Tebing Tinggi
53	Sagu rendang	Rau Ajis	Tebing Tinggi
54	Sagu rendang	H. Lusmainar	Tebing Tinggi
55	Sagu rendang	Norma	Tebing Tinggi
56	Sagu rendang	Raudah	Tebing Tinggi
57	Sagu rendang	Junaini	Tebing Tinggi
58	Sagu rendang	Asmindar	Tebing Tinggi
59	Sagu rendang	Zor Umar	Tebing Tinggi
60	Sagu rendang	Zuraikda	Tebing Tinggi
61	Sagu rendang	Nuraini	Tebing Tinggi
62	Sagu rendang	Azisdah	Tebing Tinggi
63	Sagu rendang	Amah	Tebing Tinggi
64	Sagu rendang	Taslimah	Tebing Tinggi Barat
65	Sagu rendang	Saudah	Tebing Tinggi Barat
66	Sagu rendang	Kamariah	Tebing Tinggi Barat
67	Sagu rendang	Zainab	Tebing Tinggi Barat
68	Sagu rendang	Azimah	Tebing Tinggi Barat
69	Sagu rendang	Sawilah	Tebing Tinggi Barat
70	Sagu rendang	Raudah	Tebing Tinggi Barat

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

71	Sagu rendang	Zainah	Tebing Tinggi Barat
72	Sagu rendang	PKK	Tebing Tinggi Timur
73	Sagu rendang	Wan Ebeh	Tebing Tinggi Timur
74	Sagu rendang	Kamisah	Tebing Tinggi Timur
75	Sagu rendang	Amah	Tebing Tinggi Timur
76	Sagu rendang	Timah	Tebing Tinggi Timur
77	Sagu rendang	Semah	Tebing Tinggi Timur
78	Sagu rendang	Ponget	Tebing Tinggi Timur
79	Sagu rendang	Asnah	Tebing Tinggi Timur
80	Sagu rendang	Normah	Rangsang
81	Sagu rendang	Kamariah	Rangsang Pesisir
82	Sagu rendang	Siti Mardiana	Rangsang Pesisir
83	Sagu rendang		Tasik Putri Puyu
84	Sagu rendang	Hasan	Merbau
85	Kerupuk Sagu	Rohani	Merbau
86	Kerupuk Sagu	Kasmawati	Merbau
87	Mie/Kerupuk	Fauziah	Merbau
88	Mie/Kerupuk	Sriyati	Merbau
89	Cendol sagu	Syamsiar	Merbau
90	Gobak Sagu	Esah	Merbau
91	Sagu Lemak	Sukirman	Tasik Putri Puyu
92	Sagu Lemak	Selamat/ Namek	Tasik Putri Puyu
93	Sagu Lemak	Rokiyah	Tebing Tinggi Timur
94	Sagu Lemak	Sawilah	Rangsang Pesisir
95	Kembang Loyang, kue bangkit sagu dan semprong	Seroja	Tebing Tinggi
96	Kue bangkit sagu	Serba Guna	Tebing Tinggi
97	Kue bangkit	Juliana	Merbau
98	Cendol sagu kering, kue suling saju, putri salju	Azilah	Merbau
99	Blackforest sagu, kue coco crunch sagu	Same rase	Merbau

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan , 2018

Berdasarkan dari tabel 1.1 terdapat pelaku usaha mikro berbasis sagu antara lain mi sagu, sagu rendang, kerupuk sagu, cendol sagu, gobak sagu, sagu lemak, dan

berbagai macam kue memiliki prospek untuk berkembang pesat dan mendorong pendapatan daerah juga turut membuka lapangan kerja baru. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku industri kecil pengolahan bahan baku sagu menjadi berbagai macam aneka makanan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Seiring dengan diadakannya aneka makanan berbahan baku sagu menjadi jajanan khas oleh-oleh asal kabupaten kepulauan Meranti, aktivitas industri pengolahan sagu secara tradisional semakin menarik minat masyarakat kecil menengah

Dari 99 pelaku usaha mikro sagu hanya terdapat 6 pelaku usaha mikro sagu yang telah diberdayakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun pelaku usaha mikro berbasis baku sagu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2

**Tabel 1.2 Pelaku usaha mikro sagu yang telah diberdayakan oleh dinas perindustrian perdagangan tahun 2018**

NO	Jenis Usaha	Nama Usaha	Bantuan
1	2	3	4
1	Kueh sagu (kue bangkitsagu,kembang Loyang)	Usaha Seroja SLP TIMUR	- Mesin adonan - Mesin pemotong
2	Mie sagu	Usaha Kamboja	- Kualii pengukus - Mesin potong - Talam - Mesin genset
3	Mie sagu	Usaha Maju Bersama	- Mesin adonan - Mesin pemotong
4	Mie sagu	Usaha Mandiri Anggrek	- Kualii pengukus - Mesin pemotong

1	2	3	4
			- Mesin genset - Talam
5	Mie sagu	Usaha Bude	- Mesin adonan - Mesin penggiling - Dandang besar - Hand chiler - Baskom besar
6	Mie sagu	Usaha Bersaudara	- Mesin adonan - Mesin pemotong

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

Selain bantuan peralatan pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro sagu yaitu dengan mengirim perwakilan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Provinsi selain itu juga pameran tertentu untuk memperkenalkan usaha mikro sagu.

Usaha mikro sagu semakin meningkatnya minat masyarakat dalam pelaksanaan usahanya menyebabkan munculnya daya saing yang sangat berat satu sama lain sehingga dalam pemasarannya menjadi sangat sulit. Peningkatan mutu produk berbahan baku sagu merupakan poin penting bagi usaha mikro berbahan baku sagu untuk terus bertahan dalam persaingan. Konsumen atau pembeli merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam menilai mutu yang dikonsumsinya. Bila konsumen merasa akan mendapatkan kepuasan dari suatu produk maka konsumen tersebut akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Strategi peningkatan mutu merupakan pembahasan penting yang harus terus dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar usaha mikro berbahan baku sagu yang sudah berjalan di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa berkembang lebih pesat dan berjalan efektif dan efisien.

Sedangkan untuk sebagian usaha mikro yang sudah dikenal dipangsa pasar dalam lingkup kabupaten kepulauan Meranti tingginya produksi menimbulkan keterbatasan perputaran modal. Usaha mikro berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti juga masih menggunakan teknologi yang tradisional dikarenakan keterbatasan sumber modal yang dimiliki pelaku usaha. Sumber modal yang dimiliki pelaku usaha hanya berasal dari pelaku usaha. Selain itu juga usaha mikro berbasis sagu masih belum bisa menembus pangsa pasar yang lebih luas dalam memasarkan produknya, dikarenakan belum memiliki izin bpom, brand, label halal dan sebagainya. Selain itu, persoalan sulitnya air bersih menjadi kendala yang sangat dikhawatirkan mengingat air bersih merupakan kunci utama pengolahan sagu menjadi berbagai macam aneka makanan seperti, cendol sagu, mie sagu, kerupuk sagu dan lain lain.

Para pelaku usaha mikro sagu dikabupaten kepulauan Meranti menggunakan air hujan dalam pengolahan sagu, dikarenakan buruknya kualitas air resapan. Pada musim kemarau, para pelaku usaha sagu harus menyiasati kesulitan penyediaan air bersih dengan membeli bahan baku air hujan dengan harga Rp.5.000,- per jerigen sehingga menambah biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha mikro sagu, maka perlu adanya suatu peran dari pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten kepulauan Meranti secara optimal. Peran pemerintah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Unit kecil Menengah kabupaten kepulauan Meranti yang dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi pelaku usaha mikro sagu dalam hal

memberikan jalan dan sebagai distributor produk berbahan baku sagu agar produk ini mampu menembus market yang luas.

Berdasarkan fenomena diatas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pada pengolahan usaha berbahan baku sagu masih banyak yang menggunakan cara tradisional. Hal ini dilihat masih banyak pelaku usaha mie sagu menggunakan ampia dalam mencetak mie sagu.
2. Dari aspek pemasaran pada lokasi pemasaran usaha berbahan baku sagu ruang lingkup pemasarannya hanya warung-warung yang berada pada kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu juga dalam memasarkan produk usaha belum menggunakan media promosi sehingga produk usaha kurang dikenali.,
3. Selain lokasi usaha dan media promosi, rata-rata usaha berbahan baku sagu belum mempunyai kemasan yang menarik serta belum mendapatkan merk tersendiri

Dari fenomena dan identifikasi dapat ditarik judul Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabbupaten Kepulauan Meranti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.”
2. Apa saja faktor penghambat Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.”

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberdayaan pelaku Usaha mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a) Untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain untuk meningkatkan kemampuan memecahkan suatu masalah yang ada.

## 2. Manfaat praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka memberdayakan Pelaku Usaha mikro berbasis sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b) Untuk menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten kepulauan Meranti

### **E. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten kepulauan Meranti khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan peranan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 20) Pendekatan kualitatif ini didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.

Menurut Burhan Bugin (2010: 69) menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi yang mendalam, seperti permasalahan implementasi kebijakan publik dimasyarakat.

Menurut Lexy J. Maleong (2004 :2) Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistic atau alamiah, etnografi, interaksionis, simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:22) Dari berbagai pengertian mengenai penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistic yang temuan- temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistic.

Sedang menurut Lexy J. Maleong (2004: 5) Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda ; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden ; Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola- pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya sebagaimana menurut Nasution menyatakan “ *Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama*”

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **C. Informan dan Key Informan**

.Informan adalah orang yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan formal maupun informal dengan Key informan.

Key Informan adalah orang yang mengetahui seecara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel Informant Penelitian : Tabel III.1

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti	1
2	Kepala Bidang UKM Kabupaten Kepulauan Meranti	1
3	Pelaku Usaha Mikro Sagu	10
	Jumlah	12

#### D. Teknik Penentuan Informan Dan Key Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi dengan lengkap dan akurat. Penelitian Kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan tetapi bisa tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan key informan, dan kompleksitas dari keragaman fenomena yang diteliti. Dengan demikian, informan dan key informan dapat ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan.

#### E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan Data skunder. Adapun dua jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli atau key informan yang memiliki informasi asli ataudata yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni melalui pertanyaan atau wawancara langsung yang ditujukan kepada key infoman dan pemantauan terhadap keadaan lokasi penelitian

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil pengumpulan data atau karya orang lain , yakni beberapa bahan dan literature yang relevan dengan penelitian ini baik berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian maupun data yang di peroleh dari publikasi suatu karya ilmiah.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menghimpun data dan informasi adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis menganalisis dokumen- dokumen dalam bentuk tulisan, yang menjadi acuan dalam penelitian ini.
2. Observasi, mengumpulkan informasi serta data- data yang didapat dari lapangan atau objek penelitian.
3. Wawancara, Tanya jawab langsung kepada siapa saja yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah

wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar responden mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan- pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapatnya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada model interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen yaitu reduksi data, data display dan collusion drawing .

## H. Jadwal penelitian

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
1	Persiapan & penyusunan up	X	X	X	X																
2	Seminar UP					X	X														
3	Perbaikan UP							X													
4	Tujuan Pebimbing									X	X										
5	Analisis Data											X									
6	Bimbingan Skripsi											X									
7	Perbaikan Bab ke Bab												X	X							
8	Acc Skripsi														X						
9	Ujian Skripsi															X					
10	Perbaikan																X	X	X		
11	Perbanyak / Pandangan																			X	X

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah 3.707,84 km<sup>2</sup>, secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" Lintang Utara, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" Bujur Timur. Posisi kabupaten ini terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ). Secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. 1*

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang terdiri dari dataran-dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat beberapa sungai dan tasik (danau), antara lain adalah Sungai Suir di Pulau Tebing Tinggi, Sungai Merbau, Sungai Selat Akar di pulau Padang serta Tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, Tasik Nembus di pulau Tebing Tinggi, Tasik Air Putih dan Tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>).

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas wilayah dengan Provinsi Kepulauan Riau, Selat Malaka, dan kabupaten lain di Provinsi Riau.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 7 kecamatan dan 73 desa/kelurahan. Adapun tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan ibukota Alai, Kecamatan Tebing Tinggi, Ibukota Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, ibukota Sungai Tohor, Kecamatan Rangsang, ibukota Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang Barat, ibukota Bantar, Kecamatan Merbau, ibukota Teluk Belitung, Kecamatan Pulau Merbau, ibukota Renak Dungun. Lebih rinci tentang luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.1. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Tebing Tinggi	849,50	22,91
2.	Tebing Tinggi Barat	587,33	15,84
3.	Rangsang	680,50	18,35
4.	Rangsang Barat	241,60	6,52
5.	Merbau	1.348,91	36,38
6.	Pulau Merbau	*)	*)
7.	Tebing Tinggi Timur	*)	*)
8.	Kabupaten Kepulauan Meranti	3.707,84	100,00

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017

\*) masih masuk dalam kecamatan induk

Sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya lahan yang cukup luas, Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpotensi dikembangkan menjadi daerah klaster industri sagu di Indonesia. Dengan penetapan klaster industri sagu maka tanaman sagu yang banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpeluang dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah serta nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan peluang usaha sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Peran pati sagu tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan pangan, dengan perkembangan teknologi ternyata pati sagu dapat dijadikan bahan baku

berbagai jenis industri makanan dan industri kayu lapis. Pati sagu juga berpeluang sebagai salah satu sumber bahan bakar nabati

## **B. Gambaran Umum Demografis**

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009 tercatat sebanyak 175.316 jiwa yang terdiri 89.882 jiwa laki-laki dan 85.434 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 65.613 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, yaitu 15.098 jiwa.

Penduduk laki-laki berjumlah 89.882 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 85.434 jiwa. Rasio jenis kelamin terlihat cukup berimbang, yaitu 105. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, yaitu 112 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Rangsang Barat sebesar 101.

Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terpadat pada tahun 2009, yaitu Kecamatan Rangsang Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 103 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi Barat merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 26 jiwa per kilometer persegi.

Sejak tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti cukup menggembirakan, yakni di atas 7 persen. Pada tahun 2005 ekonomi tumbuh mencapai 7,11 persen dan mencapai 7,57 persen pada tahun 2007. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di tahun 2008, yakni

7,34 persen, dan tahun 2009 turun kembali menjadi 6.59 persen (PDRB atas dasar harga berlaku). Berdasarkan PDRB harga konstan, maka selama kurun waktu 2008 -2009 ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan 7,34 persen menjadi 6,59 persen.

### **C. Sejarah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu instansi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dahulunya merupakan salah satu UPTD dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 1997 dengan Kepala UPTD bernama Norbit, selang 4 tahun berlalu digantikan oleh BINHAR, masih bernama UPTD setelah 4 tahun kepemimpinan BINHAR diganti oleh Wan Zainudin.

Tepat pada tanggal 19 Desember 2009 telah disahkan oleh DPR RI sebagai salah satu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang kemudian disebut dengan Kabupaten Kepulauan Meranti yang beribukotakan Selatpanjang.

Pada Tahun 2010 Dinas Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh Joko Trisno. Pada tanggal 14 Januari 2011 dilantik Drs. Syamsuar Ramli sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Kpts.821.2/I/2011/002, Selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Kpts. 821.2/XI/2016/069 tanggal 30 November 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.B di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu bapak H. Herman, SE., MT menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti, masih beralamat Jl. Pembangunan I Selatpanjang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan pembangunan dengan berlandaskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu: *Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani*, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

**D. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kab Kepulauan Meranti**

Adapun visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

**a. Visi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti**

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melaksanakan pembangunan dengan berlandaskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu: *Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani*, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka disusunlah misi. Adapun misi Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah; Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas dengan mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah melayu;
4. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi;
6. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan visi yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah *”terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang di dukung oleh industri, koperasi yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera”*.

Yang dimaksud dengan :

1. Terwujudnya adalah suatu upaya menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada atau sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pusat Perdagangan dan Jasa adalah wilayah yang menjadi sentral kegiatan/aktifitas masyarakat di sektor perdagangan dan jasa.
3. Industri dan Koperasi yang mapan adalah industri dan koperasi yang andal, tangguh yang siap menghadapi perubahan dan gejolak ekonomi.

4. Menunjang Ekonomi Kerakyatan adalah kegiatan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berdasarkan usaha mikro kecil dan menengah dengan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat.
5. Masyarakat Sejahtera adalah tujuan luhur menjadikan masyarakat aman, tentram, damai dan tercukupi baik sandang, pangan, papan.

**b. Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti.**

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana IKM, UMKM, perdagangan dan Metrologi.
2. Menerapkan teknologi tepat guna dan memanfaatkan potensi wilayah untuk mewujudkan kemandirian industri kecil dan menengah serta menumbuhkan wirausaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan akses pasar dan informasi usaha.
4. Mewujudkan kegiatan industri, dagang yang ramah lingkungan serta penerapan standarisasi produk.
5. Mendukung dan memfasilitasi terbentuknya produk unggulan khas Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha bagi para pelaku usaha.
7. Meningkatkan tata kelola Koperasi.
8. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.

**E. Rincian Tugas dan Fungsi Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti**

**a. Tugas dan Fungsi Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti**

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

#### **b. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM**

1. penyusunan, pelaksanaan perencanaan dan kebijakan teknis operasional Bidang Koperasi dan UMKM;
2. penyiapan bahan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi koperasi dan UMKM;
3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan bidang koperasi dan UMKM;
4. pengkoordinasian pembinaan, perumusan pengarahan dan penyuluhan terhadap dunia usaha, serta meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM;
5. penyiapan rumusan prosedur pembiayaan dan perkuatan modal bagi koperasi dan UMKM;
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM**

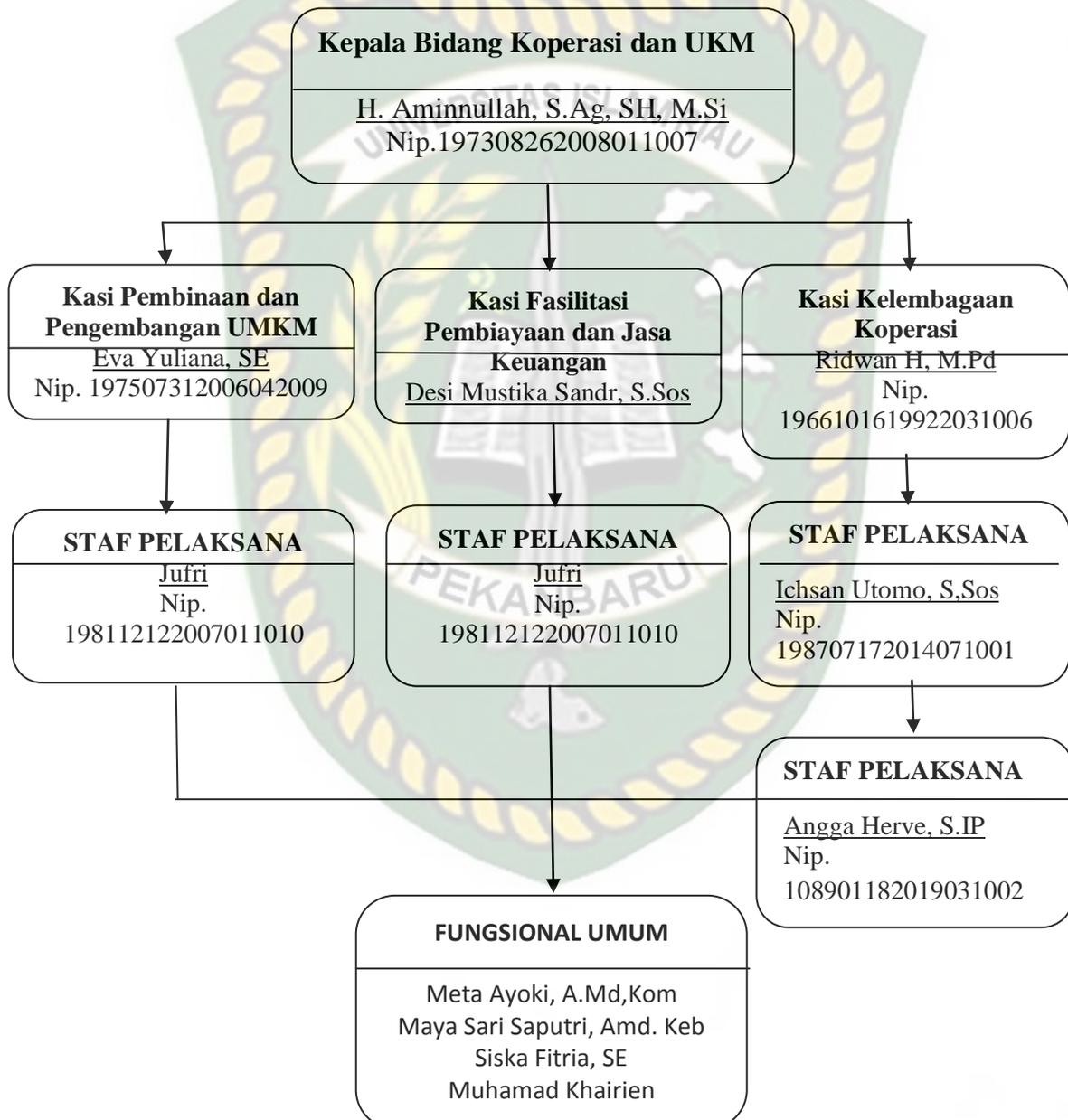
1. perencanaan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. penilaian kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
7. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
8. penginventarisasian permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
9. pembuatan Konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
10. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. penyusunan rencana program dan laporan kegiatan sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah, penjabaran dan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi informasi usaha, kesempatan berusaha dan dukungan kelembagaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat Kabupaten;
13. pengevaluasian hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
14. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Kepala Bidang

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban;

15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### F. Struktur Organisasi Bidang Koperasi dan UKM



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti akan dijelaskan berdasarkan uraian berikutini :

#### A. Identitas Responden

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu.

##### 1. Jenis kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturun kan sebagai bahana nalisis faktor – faktor yang mempengaruhi variable penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana. Pemberdayaan pelaku usaha mikro berbasis sagu dalam peningkatan mutu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini :

**Tabel V.1 Informan Menuurut Jenis Kelamin**

No	JenisKelamin	Jumlah	%
1	Laki – laki	3	25%
2	Perempuan	9	75%
Jumlah		12	100%

Sumber : modifikasi penulis, 2019

## 2. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitan lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan padatable berikut :

**Tabel V.2 Informan Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	3	25%
2	SD	2	17%
3	SMP	2	17%
4	SMA	3	25%
5	D4 – S1	1	8%
6	S2	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber : modifikasi penulis, 2019

### 3. Usia Informan

Dalam menentukan informan, juga dilihat factor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidak nya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.3 Informan Berdasarkan Usia**

No	Umur	Jumlah	%
1	31 - 40	6	50%
2	41 - 60	6	50%
Jumlah		12	100%

*Sumber* : modifikasi penulis, 2019

## **B. Hasil Analisis dan Pembahasan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti**

### **1. Pemungkinan**

Menurut Suharto (2005) Pemungkinan merupakan suatu tahapan pemberdayaan dimana pada tahap pemungkinan ini di eksekusi oleh pemerintah, dan organisasi desa serta masyarakat itu sendiri yang menciptakan suasana yang memungkinkan potensi usaha mikro berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat -sekarat kultural dan struktur yang menghambat.

Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti melalui program yang dilakukan kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu di kabupaten kepulauan meranti. Terdapat dua sub indikator dalam hal ini yaitu

- a. Program pemberdayaan
- b. Hambatan – Hambatan Pemberdayaan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti tentang program dan Hambatan-hambatan pemberdayaan dalam mengembangkan pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti yaitu :

- Penyuluhan berupa himbauan terhadap beberapa pelaku usaha mikro sagu agar mereka mengurus ke BPOM agar mendapatkan izin juga

memberitahukan syarat apa saja yang akan dibawa. Ini dilakukan di gedung Afifa Jl. Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak tiga kali pada Tahun 2018.

- Hambatan – hambatan dalam pemberdayaan ini berupa minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro Sagu sehingga mereka tidak bisa mengembangkan pemikiran mereka tentang bagaimana caranya menghasilkan produk yang berkualitas. Dana juga menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan ini karena terbatasnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Dalam pemberdayaan pelaku usaha mikrosagu ini kami membuat program yaitu dalam bentuk memberikan penyuluhan atau bimbingan terhadap pelaku usaha mikrosagu agar mereka lebih mengetahui tata cara memproduksi sebuah produk berbasis sagu yang berkualitas. Penyuluhan ini sudah dilakukan tiga kali selama tahun 2018 yang digelar di gedung Afifa kabupaten kepulauan meranti..(H. Herman SE.MT, 2 Agustus 2019)”.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang UKM kabupaten kepulauan meranti pada hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2019 tentang program dan faktor penghambat dalam mengembangkan pelaku usaha mikro berbasis sagu di kabupaten kepulauan meranti.

“Dalam program yang sudah kami lakukan untuk mengembangkan pelaku usaha mikro berbasis sagu ini yaitu adanya program penyuluhan dan juga bimbingan serta memberikan bantuan fasilitas berupa mesin penggiling sagu dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti agar pelaku usaha mikro berbasis sagu yang ada di kabupaten kepulauan meranti bisa menghasilkan produk berbasis sagu yang bermutu. Dalam melakukan pemberdayaan terdapat juga kendala atau hambatan yaitu berupa minimnya pengetahuan yang

dimiliki oleh para pelaku usaha mikro sagu juga dana yang tidak memadai untuk melakukan program ini sehingga program ini berjalan terbatas.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa didalam mengembangkan pelaku usaha mikro sagu dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti sudah melakukan program yaitu memberikan penyuluhan, bimbingan, serta menyediakan fasilitas untuk pengolahan sagu.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha sagu, tentang program apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengembangkan usaha mikro sagu.

“menurut saya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada kami sebagai pelaku usaha yang berbasis sagu yang kami terima hanya bantuan berupa mesin, baskom, kual, dan alat alat lain untuk mengolah berbagai bentuk makanan yang berbasis sagu. Pemilik usaha Mie Sagu Bersaudara ( Sulung M. 2 Agustus 2019)”.

“Yang kami ketahui tentang program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan usaha berbasis sagu di kepulauan meranti ini, pemerintah hanya ada memberikan bantuan menyediakan fasilitas untuk memasak dan membuat olahan sagu supaya sagu bisa di kerjakan dengan cepat yaitu alat pencetakan mie sagu. Pemilik usaha Mie Sagu Bude ( Ani 2 Agustus 2019)”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa upaya pengembangan usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti sudah memberikan manfaat kepada pemilik usaha sagu dikabupaten kepulauan meranti hal ini dapat dilihat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik

usaha mikro sagu seperti mesin pencetak mie sagu dan alat-alat pengolah sagu lainnya.

Adapun hasil observasi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 terhadap Dinas dan Pelaku Usaha Mikro dapat disimpulkan peneliti bahwa masih banyak pelaku usaha mikro sagu yang belum mampu mengembangkan pengetahuan yang didapat dari penyuluhan dan pembinaan hal tersebut di karena kan pelatihan yang diberikan kurang banyak hanya beberapa kali saja dilakukan oleh dinas pada tahun 2018.

## 2. Penguatan

Menurut Suharto (2005)Penguatan merupakan salah satu bentuk untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- Penyediaan jasa

Penyuluhan dan pembinaan ini diberikan langsung oleh kepala dinas UMKM tidak ada mentor lain selain dinas.

- Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pemberdayaan yaitu terdapat 6 pelaku usaha mikro sagu dan keenam pelaku usahatersebut telah diberdayakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam hal ini penguatan yang dimaksud adalah memberikan pembinaan dan pelatihan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah terhadap para pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti. Dalam hal ini terdapat dua sub indikator yaitu

- a. Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Mikro Sagu
- b. Pelatihan terhadap Pelaku Usaha Mikro Sagu

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu yang ada dikabupaten kepulauan meranti :

“untuk meningkatkan mutu produk sagu dari pelaku usaha mikro berbasis sagu kami dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti sudah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu dengan mengundang pelaku usaha tersebut agar bisa menghadiri pelatihan yang dilakukan di gedung afifa. Dan alhamdulillah banyak para pelaku usaha yang menghadiri pelatihan tersebut” .(H. Herman SE.MT, 2 Agustus 2019)”.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu penulis juga melakukan wawancara kepada kepala bidang UKM kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai berikut :

“saya selaku kepala bidang ukm kepulauan meranti dan rekan rekan sudah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap setiap para pelaku usaha untuk memberikan manfaat dan pengalaman bagaimana caranya agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus dan bagaimana cara

menggunakan mesin atau fasilitas yang diberikan dengan cara yang baik dan benar. (H. Aminnullah, S. Ag, SH, M.Si 2 Agustus 2019)".

Selanjutnya agar mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu di kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai berikut :

"Dari dinas memang sudah ada mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada saya dan pelaku usaha mikro berbasis sagu lainnya namun pelatihan dan penyuluhan tersebut sampai saat ini bisa dihitung sekitar 3 kali yang kami dapatkan dari pelatihan tersebut sehingga kami masih kurang mampu untuk mengerti akan apa aja yang telah di lakukan dinas tersebut" usaha mi sagu bude(Ani 2 agustus 2019)".

"menurut saya pembinaan yang dilakukan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah belum ada pengaruhnya sama sekali karena hasilnya produk yang kami hasilkan sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan itu sama saja hasilnya saya menilai cara yang dilakukan oleh dinas masih kurang efektif sehingga program itu tidak berjalan lancar dan baik. . Pemilik usaha Mie Sagu Bersaudara ( Sulung M. 2 Agustus 2019)".

"pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu tidak berjalan dengan lancar sehingga saya dan pelaku usaha lainnya tidak mengerti bagaimana cara nya memproduksi produk berbasis sagu yang memiliki mutu atau kualitas yang bagus. Pemilik usaha mie sagu kemboja (Nur 2 agustus 2019)".

Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu masih bisa dikatakan belum efektif dan berjalan sesuai apa yang di rencanakan, hal ini dapat dilihat dari hasil produk yang

diproduksi oleh pelaku usaha mikro sagu sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan memiliki hasil produk yang sama saja.

### 3. Perlindungan

Menurut Suharto (2005) Melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus di arahkan kepada penghapusan segala jenis deskirminasi dan dominasi yang tidajk menguntungkan rakyat kecil.

Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud adalah memberikan rekomendasi surat izin usaha dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro sagu serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti. Terdapat tiga sub indikator dalam indikator perlindungan yaitu :

- a. Rekomendasi surat izin usaha
- b. Perlindungan hokum terhadap Pelaku Usaha Mikro Sagu
- c. Melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Mikro Sagu

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menurut kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti tentang perlindungan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu yaitu sebagai berikut :

“Dalam perlindungan terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu dinas telah melakukan perlindungan dengan memberikan rekomendasi surat izin usaha dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu juga nkami sebagai mdinas telah memberikan atau melakukan pengawasan

terhadap kegiatan pelaku usaha mikro berbasis sagu agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan usaha (H. Herman SE.MT, 2 Agustus 2019)".

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang perlindungan dan pengawasan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala bidang UKM kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai berikut :

"Dari pihak kami kepala bidang UKM juga menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah untuk memberikan rekomendasi surat izin usaha kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu agar pelaku usaha ini bisa berjalan lancar tidak memiliki masalah dalam menjalankan usaha kedepannya (H. Aminnullah, S. Ag, SH, M.Si 2 agustus 2019)".

agar mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang perlindungan dan pengawasan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro sagu penulis juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro sagu di kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai Selanjutnya berikut :

"Dari dinas memang sudah ada memberikan rekomendasi surat izin usaha terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti kami sangat berterimakasih kepada dinas namun dari dinas belum melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu ini kami sangat berharap agar dinas melakukan pengawasan agar kami tidak melakukan kesalahan yang besar. pemilik usaha mie sagu bude (Ani 2 agustus 2019 )

"menurut saya perlindungan yang diberikan pemerintah sudah terlaksana yaitu dengan adanya pemberian rekomendasi surat izin usaha oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti tetapi belum ada pengawasan yang dilakukan pihak dinas sampai saat ini. Pemilik Usaha Mie Sagu bersaudara ( Sulung M 2 agustus 2019)".

"Perlindungan yang diberikan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah terhadap pelaku usaha mikro berbasis

sagu dikabupaten kepulauan meranti memnag telah ada.tetapi pengawasan yang belum ada . Pemilik Usaha Mie Sagu Kemboja ( Nur 2 agustus 2019)”.

Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu sudah berjalan dengan baik namun pengawasan belum ada dilakukan dari pihak dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kepada pelaku usaha mikro sagu dikabupaten kepulauan meranti.sungguh di sayangkan sekali karena hal itu bisa membahayakan bagi pelaku usaha mikro sagu itu sendiri.

#### **4. Penyokongan**

Menurut Suharto (2005) Penyokongan merupakan memberi bimbingan dan dukungan agar pmasayarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugasnya kehidupannya pemberdayaan harus mampu masyarakat agar tridak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- a. Menyediakan Fasilitas Kepada Pelaku Usaha Mikro Sagu
- b. Memberikan Bimbingan kepada Pelaku Usaha Mikro Sagu

Dalam hal ini penyokongan yang dimaksud adalah memberikan atau menyediakan fasilitas berupa mesin dan alat pengukus sagu terhadap pelaku usaha mikro sagu serta mengajarkan bagaimana cara menggunakan fasilitas itu dengan baik dan benar terhadap pelaku usaha mikro sagu dikabupaten kepulauan meranti. Anggaran fasilitas yang disediakan berupa sebuah mesin penggiling sagu, mesin pengepres sagu, pencetak mie sagu, dandang pengukus mi sagu, kawah perebus

sagu. Dana yang dianggarkan sekitar Rp 185.250.000 untuk membeli alat atau fasilitas tersebut

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kepada kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti tentang penyokongan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu yaitu sebagai berikut :

“Dalam penyokongan dinas perindustrian perdagangan telah mendukung pelaku usaha mikro berbasis sagu dengan cara menyediakan fasilitas kepada pelaku usaha tersebut fasilitas yang telah disediakan itu berupa alat seperti mesin, dandang, kompor dan alat lainnya untuk mencetak sagu menjadi mie sagu (H. Herman SE. MT 2 Agustus 2019)”.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang penyokongan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro sagu peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala bidang UKM kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai berikut :

“ Saya selaku kepala bidang UKM ikut memberikan bantuan fasilitas bersama kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti beserta anggota saya fasilitas tersebut berupa mesin pencetak mie sagu dandang pengukus sagu dan kompor sehingga pelaku usaha mikro berbasis sagu bisa menghasilkan produk yang bisa memuaskan (2 Agustus 2019)”.

agar mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang penyokongan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro sagu peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro sagu di kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai Selanjutnya berikut :

“Penyokongan dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah telah diberikan dengan menyediakan fasilitas kepada saya dan pelaku usaha mikro berbasis sagu lainnya saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah. Tetapi mereka kurang jelas dalam menerangkan bagaimana tata cara menggunakan fasilitas yang telah disediakan agar bisa menghasilkan produk berbasis sagu yang berkualitas. Pemilik Usaha Mie Sagu Bude ( Ani 2 agustus 2019 )”.

“Memang sudah ada pemberian bantuan dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu di kabupaten kepulauan meranti namun kami tidak sangat paham untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan sehingga kami belum mampu memproduksi produk yang sangat berkualitas. Pemilik Usaha Mie Sagu Bersaudara ( Sulung M 2 agustus 2019 )”.

“fasilitas yang telah disediakan berupa mesin, dandang, belum mampu kami manfaatkan secara maksimal hal ini dikarenakan karena kurang mengertinya kami bagaimana cara menggunakan mesin tersebut agar mie sagu buatan kami tidak keliatan keriting inilah yang kami alami saat ini belum mampu memproduksi produk yang berkualitas tinggi. Pemilik Usaha Mie Sagu Kemboja ( Nur 2 agustus 2019 )”.

Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penelitian menyimpulkan bahwa penyokongan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro sagu sudah berjalan dengan lancar hal ini bisa kita lihat dari adanya beberapa pelaku usaha mikro sagu yang telah menerima bantuan berupa mesin dandang dan alat lainnya. Namun penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas yang disediakan masih kurang efektif. pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas sehingga kurang mampu bersaing di pangsa pasar yang luas

## 5. Pemeliharaan

Menurut Suharto (2005) Pemeliharaan merupakan memelihara kondisi agar kondusif dan tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini pemeliharaan yang dimaksud adalah memberdayakan pelaku usaha mikro sagu dalam menjaga keseimbangan pasar bagi mereka atau memberdayakan pelaku usaha mikro sagu dengan cara menyediakan fasilitas memberikan penyuluhan dan pelatihan agar mereka bisa menghasilkan produk berbahan sagu yang memiliki kualitas dan potensi besar.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kepada kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti tentang pemeliharaan yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu yaitu sebagai berikut :

“Dalam bentuk pemeliharaan dinas perindustrian perdagangan telah melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro berbasis sagu salah satunya dengan menjaga keseimbangan pasar bagi mereka agar bisa menyuplai produk nya kepasar dengan pasaran yang normal (H. Herman SE. MT 2 agustus 2019 )”.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang pemeliharaan yang dilakukan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro sagu peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala bidang UKM kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai berikut :

“ Saya selaku kepala bidang UKM ikut memberikan pemeliharaan dalam bentuk pemberdayaan bersama kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti beserta anggota saya pemberdayaan yang kami lakukan salah satunya yaitu memberikan fasilitas memberikan penyuluhan hingga kami ikut menjaga

keseimbangan pasar bagi para pelaku usaha mikro berbasis sagu dikabupaten kepulauan meranti (H. Aminnullah, S. Ag, SH, M.Si2 agustus 2019)".

agar mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang pemeliharaan yang dilakukan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro sagu peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro sagu di kabupaten kepulauan meranti yaitu sebagai Selanjutnya berikut :

“Pemeliharaan dari dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti memang telah dilakukan salah satunya berupa pemberdayaan memberikan fasilitas dan memberikan pelatihan kepada kami namun produk yang kami hasilkan tidak bisa bersaing di pasar yang luas karna tidak seimbangnnya harga dipasar bagi kami sehingga kami hanya bisa memasukkan kewarung terdekat. Pemilik Usaha Mie Sagu Bude ( Ani 2 agustus 2019 )”.

“menurut saya pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana yaitu berupa pemberdayaan seperti memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu memberikan pelatihan dan menyediakan fasilitas kepada kami tetapi belum bisa menjaga keseimbangan di pasar sehingga kami kalah bersaing dipasar dan hanya bisa memasukkan produk kewarung terdekat.. Pemilik Usaha Mie Sagu bersaudara ( Sulung M 2 agustus 2019)”.

“pemberdayaan yang telah dilakukan dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu berupa memberikan penyuluhan dan pelatihan menyediakan fasilitas bantuan mesin kompor dan sebagainya memang telah terlaksana namun keseimbangan pasar belum bisa dikatakan telah dilakukan oleh dinas karena bisa kita lihat kami belum bisa bersaing di pasar yang luas hanya diwarung warung terdekat produk kami beredar. Pemilik Usaha Mie Sagu Kemboja ( Nur 2 agustus 2019 )”.

Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pemeliharaan yang di lakukan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro berbasis sagu sudah berjalan dengan lancar hal ini bisa kita lihat dari adanya beberapa pelaku usaha mikro berbasis sagu yang telah menerima bantuan

berupa mesin dandang dan alat lainnya. Namun keseimbangan pasar belum terjaga sehingga banyak pelaku usaha mikro berbasis sagu yang belum mampu bersaing di pangsa pasar yang luas sehingga produk yang dihasilkan oleh mereka hanya beredar di warung warung terdekat.

**6. Hambatan – hambatan pemberdayaan pelaku usaha mikro Sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh informasi tentang pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu dalam meningkatkan mutu dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan hambatan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro berbasis sagu di kabupaten kepulauan meranti, maka dapat di tarik benang merah bahwa faktor faktor penghambatnya adalah sebagaiberikut :

- Pelaku usaha mikro sagu minim pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan produk berbahan baku sagu yang bermutu sehingga membuat produk yang dihasilkan tidak mampu menembus pangsa pasar yang luas dan produk tersebut hanya beredar di kedai kedai terdekat.
- Anggaran yang terbatas juga menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut hasil analisa yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Sagu Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti belum efektif terkait dengan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan yang mana pelatihan, pembinaan tersebut hanya dilakukan 3 kali pada tahun 2018 dan pada penyediaan fasilitas sudah mendapatkan hasil yang positif.
2. Hambatan – hambatan pemberdayaan pelaku usaha mikro sagu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh informasi tentang pemberdayaan pelaku usaha mikro berbasis sagu dalam meningkatkan mutu dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan hambatan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikrosagu dikabu paten kepulauan meranti, maka dapat di tarik benang merah bahwa faktor faktor penghambatnya adalah masih banyaknya pelaku usaha mikro sagu yang minim pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan produk berbahan baku sagu yang bermutu sehingga membuat produk yang dihasilkan tidak mampu menembus pangsa pasar yang luas dan produk

tersebut hanya beredar di kedai kedai terdekat. Selain itu kurangnya perhatian dari pemerintah yang mana bisa kita lihat dari banyaknya pelaku usaha mikro berbasis sagu di kabupaten kepulauan meranti belum memiliki label tersendiri hal itu dikarenakan minimnya dana yang dimiliki oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten kepulauan meranti

### **B. Saran**

1. Kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya memberikan penyuluhan yang rutin tidak seperti yang telah dilaksanakan saat ini yang mana jumlahnya bisa dihitung yaitu sebanyak tiga kali dan mestinya harus lebih dari itu sehingga pengetahuan pelaku usaha mikro sagu ini memiliki pengetahuan yang tinggi dan bisa memproduksi produk berbasis sagu yang bermutu.
2. Kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya dinas lebih bisa mengalokasikan dana untuk tahun kedepan agar Pelaku Usaha Mikro Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa lebih baik lagi kedepannya.
3. Kepada pelaku usaha mikro sagu di kabupaten kepulauan meranti seharusnya pelaku usaha mikro sagu ini lebih kreatif dan inovatif untuk mencari informasi agar pengetahuan mereka tentang memproduksi produk berbasis sagu bisa mendapatkan hasil yang bagus tidak hanya bergantung terhadap pemerintah.

4. Kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti penyebab Pelaku Usaha Mikro Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu bersaing di pangsa pasar yang lebih luas dalam mempromosikan produk yang mereka produksi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afifuddin, 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayu Surya Ningrat, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bugin, 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- C.F. Strong Dalam Muhaddam Labolo, 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Giroth, Lexie, M, 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja. Public Policy Studies. Good Governance and Performance Driven Pamong PRaja*. Jatinangor: STPDN Press.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Inu Kencana Syafiie, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syafiie, 2011. *Managemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaddam Labolo, 2005. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada.

- Rahimulla, 2008. *Hukum Tata Negara Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Rasyid Rias, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarno Siswanto, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryaningrat, 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taliziduhu Ndraha, 2003. *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thaib, D, 2000. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Umar. H, 2008. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Widjaja, H, A, W, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.

**Perundang – undangan :**

Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Peraturan Bupati no 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti